

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Saat ini pemanfaatan sumberdaya cenderung berlebih dan tidak terkontrol, hal ini dapat mengancam keanekaragaman dan keseimbangan sumberdaya alam hayati laut terkhusus sumberdaya perikanan. WWF Bersama mitra-mitranya sesama organisasi lingkungan mendukung Balai Taman Nasional Wakatobi (BNTW) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan TNW khususnya sumberdaya ikan dan terumbu karang agar tetap terjaga dari ancaman lingkungan yang buruk. Untuk itu perlu dilakukan langkah atau upaya pemantauan terhadap segala usaha pemanfaatan sumberdaya laut (sumberdaya perikanan). Guna memperlambat laju penurunan potensi sumberdaya perikanan di TNW, maka pentingnya dilaksanakan kegiatan monitoring Resource Use. Kegiatan pemantauan pemanfaatan sumberdaya atau *Resources Use* berfungsi untuk memantau dan mengukur tingkat partisipasi para pihak dalam upaya mendukung pelaksanaan dan kepatuhan hukum atas zonasi TNW.

Banyak hambatan dan tantangan yang dialami oleh WWF baik dari segi teknis maupun dari masyarakatnya langsung selama menjalankan programnya di Wakatobi maupun di Kaledupa. Masyarakat sebagai aktor kunci efektivitas pengelolaan kawasan diharapkan partisipasinya dalam membantu pelestarian dan pengelolaan lingkungan laut untuk keberlanjutan pembangunan dimasa yang akan datang. Mengelola kawasan kaya keragaman hayati, seperti TNL Wakatobi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tantangan telah terlihat, yang diperlukan sekarang adalah kemauan dan

manajerial mumpuni yang ditunggu demi menjaga salah satu kawasan keragaman laut terkaya di dunia ini. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk mematuhi peraturan perikanan. Harus diterapkannya sanksi disetiap pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang juga dapat meminimalisir hambatan konservasi sumberdaya perikanan. Aturan formal dan aturan adat harus ditegakkan, karena muara semua kebijakan ini juga untuk kesejahteraan rakyat Wakatobi, terutama para nelayan.

Adapun faktor yang menghambat dalam upaya konservasi sumberdaya perikanan di Pulau Kaledupa adalah hal-hal yang dapat menghambat kinerja World Wide Fund For Nature Wakatobi dalam upaya konservasi sumberdaya perikanan seperti: Faktor sarana/fasilitas pendukung, menjadi salah satu penghambat dalam upaya konservasi, khususnya sarana prasarana dilaut. Sarana prasarana yang dimaksud meliputi; kapal laut, speed boat, senjata api, *Global Position System* (GPS), kompas, bahan bakar yang harus memadai. Disamping itu proses patroli dilaut memerlukan biaya yang tinggi, penguasaan teknologi kelautan dan dukungan kemampuan sumberdaya manusia di bidang konservasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sarana atau fasilitas pendukung pelaksanaan tugas patroli juga menyebabkan penghambat keberhasilan program konservasi. Faktor aparat penegak hukum, Luas kawasan tidak sebanding dengan jumlah pengaman/aparat yang bertugas dilapangan. Pelaksanaan kegiatan patroli dilakukan secara acak karena luas wilayah yang harus diawasi disamping itu medan atau kondisi perairan laut cukup berat harus melalui lautan besar, sangat membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Dan Faktor masyarakat yaitu kemiskinan,

pemahaman dan pengetahuan yang rendah juga keterbatasan sarana usaha bagi nelayan menjadi faktor penghambat upaya konservasi. Dikarenakan masyarakat sebagai nelayan sulit untuk menghentikan cara-cara penangkapan ikan dengan tidak ramah lingkungan. Kemudian kebiasaan turun temurun dalam hal kegiatan penangkapan ikan di perairan Kaledupa tidak mengenal adanya zonasi dan adanya pengaruh godaan/pengaruh dari luar Wakatobi dengan pemberian fasilitas-fasilitas tertentu.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai program WWF dalam upaya konservasi sumberdaya perikanan Wakatobi pulau Kaledupa, maka ada beberapa poin yang menjadi rekomendasi untuk keberhasilan program tersebut. Dengan rekomendasi ini, diharapkan dampak positif pengelolaan dapat lebih dirasakan seiring dengan menurunnya tingkat ancaman terhadap sumber daya hayati laut.

1. Melakukan patroli reguler dan mengukur tingkat kepatuhan pengguna sumber daya (compliance rate).

Patroli reguler harus tetap dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan sumber daya hayati dan untuk mengukur tingkat kepatuhan pengguna sumber daya. Tingkat kepatuhan diukur dengan disinkronisasi antara patroli reguler dan RUM (*resource use monitoring*) Tingkat kepatuhan dimonitor agar dapat diketahui sejauh mana masyarakat mematuhi peraturan perikanan dan pengelola dapat merumuskan kebijakan yang mendorong pengguna sumberdaya patuh terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, perlu adanya sosialisasi

kepada nelayan terkait alat tangkap pilihan sehingga menjadi unit penangkapan ikan yang berdayaguna dan berhasil guna.

2. Melakukan revisi untuk format pendataan *resource use* .

Tim *resource use* melakukan salah satu pendataan mengenai jenis dan jumlah hasil tangkapan. Namun kategori yang digunakan masih bersifat umum (ikan mati, ikan hidup, campuran, belum ada hasil, dan sebagainya). Disarankan untuk melakukan pencatatan lebih spesifik atau fokus kepada beberapa jenis ikan yang juga menjadi fokus *reef health monitoring* (*Haemulidae*, *Lutjanidae*, *Serranidae*, *Scaridae*, dan sebagainya). Pencatatan nama ikan dikelompokkan sesuai famili, hal ini mempermudah observer atau surveyor dapat lebih mudah menghitung jumlah hasil tangkapan dan mengidentifikasi jenis.

3. Melakukan survei dinamika populasi *Lutjanus bohar* (kakap merah).

Di beberapa tempat dalam kawasan TNW jenis ikan merupakan ikan ekonomis penting yang sudah diketahui lokasi pemijahannya. *Overfishing* mengancam ikan apabila tidak ada aturan terkait dengan pengendalian ukuran dan jumlah hasil tangkapan. Oleh karena itu, survei dinamika populasi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola menyusun rencana pengelolaan perikanan *Lutjanus bohar*.

4. Melanjutkan pemantauan lokasi pemijahan ikan (SPAGS).

SPAGS terakhir kali dipantau pada tahun 2014. Beberapa tahun sebelumnya dilaporkan bahwa ikan jenis Kakap Merah hilang dari lokasi SPAGS. Pengelola mengasumsikan bahwa hal ini terkait dengan

pembangunan infrastruktur di dekat lokasi SPAGS. Pemantauan sebaiknya terus dilakukan dengan frekuensi yang lebih kecil untuk SPAGS yang telah dikonfirmasi. Frekuensi pemantauan dapat dialihkan untuk kembali mengobservasi SPAGS dilokasi lain yang belum dikonfirmasi dan ditemukan.

5. Meningkatkan kapasitas masyarakat.

Masyarakat sebagai aktor utama dalam aktivitas perikanan maupun pariwisata. Mereka sebagai informan kunci ketika aktivitas lokal (pariwisata, perikanan, dan sebagainya) hanya aktif pada saat mendapatkan bantuan dari pihak luar (LSM atau pemerintah) dan lembaga atau organisasi tersebut tidak aktif saat bantuan dari pihak luar dihentikan. Oleh karena itu, pengelola diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk dapat lebih mandiri mengorganisir kelompoknya baik dari sisi program maupun pengelolaan keuangan. Diperlukan juga peningkatan kapasitas masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang zonasi. Proses pemahaman dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang peraturan, peta lokasi kawasan dan zonasi, serta manfaat kawasan. Dengan hal tersebut diharapkan masyarakat dapat paham dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang diterapkan dalam kawasan.